

**NAGA DI PINGGIR KALI SEMARANG
(KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA TAHUN 2000-AN)**

Rendi Febrian Saputra¹, Putri Agus Wijayati²

Universitas Negeri Semarang^{1,2}
rendisap086@students.unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi kehidupan etnis Tionghoa di Semarang pasca Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan metode sejarah meliputi heuristik atau pengumpulan sumber, kritik internal dan eksternal terhadap sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi. Artikel ini menggunakan sumber berupa wawancara dan sumber tekstual yang diperoleh dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Pusat Dokumentasi Suara Merdeka, Monumen Pers Solo yang menyimpan berbagai literatur berupa surat kabar sezaman, majalah sezaman, dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Semarang memperoleh kemerdekaan dalam beribadah dan mengekspresikan kebudayaan di ruang publik sejak tahun 2000. Era ini memberikan angin segar bagi etnis Tionghoa karena mulai memperoleh kebebasan dan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Simpulan penelitian yakni masa reformasi memberikan sentuhan positif bagi kelayakan hidup etnis Tionghoa, menjadi sejajar dengan etnis lain di Indonesia.

Kata Kunci: Budaya, Pecinan, Semarang, Tionghoa.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the living conditions of the Chinese ethnic group in Semarang post-New Order. The research method used is based on historical methodology, which includes heuristics or source collection, internal and external criticism of sources, interpretation, and historiography. This article utilizes sources such as interviews and textual materials obtained from the Central Java Provincial Library, the Suara Merdeka Documentation Center, and the Solo Press Monument, which houses various literature including contemporary newspapers, magazines, and government documents. The findings indicate that the Chinese ethnic group in Semarang gained the freedom to worship and express their culture in public spaces starting in 2000. This era brought fresh air for the Chinese community as they began to obtain freedom and rights as Indonesian citizens. The conclusion of the research is that the reform era has positively impacted the living conditions of the Chinese ethnic group, aligning them with other ethnic groups in Indonesia.

Keywords: Chinatown, Chinese, Culture, Semarang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikulturalisme dan multietnis. Realitas itu dijumpai melalui keberadaan beragam etnis, bahasa, dan agama yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia jika ditempatkan dalam konteks harmonisasi. Di sisi lain, pluralitas kultural tersebut mempunyai potensi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas kultural rawan dijadikan sebagai media untuk memicu timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), walaupun sebenarnya faktor pemicu dari pertikaian itu lebih mengarah pada permasalahan kesenjangan ekonomi (Christie, 2023; Rahardjo, 2005).

Berbagai penelitian mengenai kehidupan etnis Tionghoa di kota-kota besar di Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya dikaji Alamsyah mengenai Harmonisasi hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di Surabaya pada masa kerusuhan Mei 1998 (Alamsyah, 2019). Menurutnya, etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan baik dari warga Surabaya karena terbiasa hidup berdampingan dalam keseharian. Sikap toleransi warga Surabaya terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 terlihat dari adanya perlindungan yang diberikan warga Surabaya agar etnis Tionghoa tidak dijadikan sasaran massa. Sikap toleransi ini dikarenakan warga Surabaya tidak menganggap etnis Tionghoa sebagai orang asing, sehingga berhak mendapatkan apa yang didapatkan warga Surabaya.

Sementara itu, dalam studi Putro tentang konflik rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta tahun 1972-1998 (Putro et

al., 2017). Menurutnya, etnis Tionghoa di Surakarta mengalami kekerasan rasial selama 3 kali pada tahun 1972, 1980, dan 1998 dengan faktor pemicu yang berbeda-beda. Faktor pemicu di antaranya, adanya provokasi hingga memunculkan massa yang besar, konflik individual antara warga pribumi dan etnis Tionghoa, serta adanya aksi demonstrasi mahasiswa. Akibat dari konflik rasial tersebut tentunya memengaruhi kondisi perekonomian di Surakarta karena banyaknya toko-toko milik warga etnis Tionghoa yang dijarah sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok. Sektor pendidikan juga terdampak dengan diliburkannya sekolah untuk sementara waktu hingga kondisinya membaik (Nurhidayah, 2023). Upaya untuk mengatasi peristiwa kerusuhan rasial tersebut dilakukan oleh beberapa pihak, seperti ABRI, pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat maupun mahasiswa.

Berbeda dengan kajian di atas, studi yang membahas tentang peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta juga telah disinggung (Ginting et al., 2019). Dalam tulisannya, dihadirkan perbincangan mengenai faktor pemicu terjadinya kerusuhan yang lebih disebabkan krisis ekonomi dan peristiwa Trisakti. Etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa pada peristiwa Mei 1998 karena beberapa hal, diantaranya yakni kebijakan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru berakibat pada melonjaknya perekonomian etnis Tionghoa di atas perekonomian pribumi. Kebijakan lainnya yaitu mengacu pada status kewarganegaraan etnis Tionghoa dan program asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah justru membatasi ruang gerak dalam beribadah dan menyelenggarakan kebudayaannya. Faktor lainnya diungkapkan juga dalam studi (Wasino et al., 2019) dengan adanya hubungan khusus

antara pengusaha Tionghoa dengan pemerintah Orde Baru yang saling menguntungkan di antara keduanya, namun memengaruhi perekonomian negara menjadi tidak sehat karena ketergantungan terhadap kedua pihak tersebut. Selain itu, kondisi Indonesia tahun 1997 semakin diperparah dengan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa.

Salah satu kota di Jawa dalam konteks tulisan di sini, yaitu Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang secara geografis terletak di Pesisir Utara Jawa. Letak ini memengaruhi Semarang terbuka untuk masuknya pengaruh dari luar, salah satu pengaruh itu adalah masuknya beragam suku bangsa, seperti Koja, Arab, dan Tionghoa. Kedatangan etnis Tionghoa turut dalam membentuk permukiman yang menjadi huniannya dikenal dengan Pecinan. Kampung Pecinan tidak hanya menjadi ruang sosial semata, tetapi juga ruang ekonomi dan budaya. Ruang ekonomi terlihat dari lokasi strategis dengan aktivitas perdagangan terjalin melalui gang dan toko-toko di sepanjang jalan (Choironi Rosida, 2004) serta sebuah kali yang pada abad-abad sebelumnya menjadi sarana transportasi dan kegiatan perdagangan (Debby & Dewi, 2019). Sementara ruang budaya terlihat dari perayaan imlek, pakaian dan pertunjukan barongsai (Liana, 2005).

Kehidupan etnis Tionghoa di Kota Semarang terutama pada periode 2000-an masih belum banyak dikaji, karena umumnya tema penelitian hanya mencakup masa Orde Baru, kerusuhan rasial, dan peristiwa Mei 1998. Hal inilah yang kemudian menurut penulis perlu dikaji lebih dalam, terutama untuk periode 2000-an. Secara faktual

penulis tertarik mengenai kajian etnis Tionghoa di Semarang, karena kebebasan dalam beribadah dan menyelenggarakan kebudayaan mengalami pembatasan selama masa pemerintahan Orde Baru dan mulai memperoleh kebebasannya pada masa reformasi.

Kebaruan penulisan ini memperdalam pembahasan kehidupan etnis Tionghoa di Semarang terutama masa reformasi. Penulisan ini memiliki beberapa manfaat dalam bidang pendidikan. Manfaat pertama, dapat digunakan sebagai materi pembelajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi, terutama sejarah perkotaan dan sejarah lokal. Manfaat kedua, dapat dijadikan sebagai literatur tambahan untuk penulisan tema Tionghoa di masa mendatang. Sedangkan, tujuan dari penulisan ini untuk menunjukkan kegembiraan etnis Tionghoa di Pecinan Semarang dalam beribadah dan berbudaya sejak masa reformasi berlangsung.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode berdasarkan lima tahapan penelitian sejarah, yaitu dengan melakukan pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik internal dan eksternal terhadap sumber sejarah, interpretasi atau penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik hingga menuju tahapan terakhir yakni melakukan penulisan sejarah dengan sumber yang telah dikumpulkan.

Sumber yang digunakan untuk membangun narasi historis dalam tulisan ini menggunakan data tekstual atau tertulis, terutama yang termasuk ke dalam kategori dokumen publik. Pemanfaatan sumber tekstual dapat diperoleh dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Semarang yang mengoleksi surat kabar sezaman dengan realitas masa lalu yang dikonstruksi.

Sumber tekstual lainnya diperoleh di Monumen Pers Solo yang memiliki koleksi surat kabar dari berbagai media seperti, *Suara Karya* tahun 1980, *Bernas* tahun 1992, dan *Waspada* tahun 2002. Sedangkan surat kabar lokal diperoleh pada Pusat Dokumentasi Suara Merdeka Semarang, yang menyimpan surat kabar yang pernah diterbitkan, sehingga membantu penulis dalam mengumpulkan beragam informasi dari periode yang dikaji dalam artikel ini untuk menjelaskan kehidupan masyarakat Pecinan di Kota Semarang. Surat Kabar Suara Merdeka yang digunakan dalam tulisan ini terbit dalam kurun waktu 1999-2002. Kedua pusat dokumentasi pers tersebut menyajikan datanya dalam dua bentuk yakni, bentuk fisik dan digital.

Sumber lainnya yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber yang masih dapat diakses hingga saat ini guna memperdalam data yang diperoleh. Wawancara ini menggunakan pendekatan sejarah lisan yang dilakukan dengan beberapa narasumber seperti, umat klenteng Tay Kak Sie, pedagang di Gang Cilik, dan masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN

Terbentuknya Kampung Pecinan

Kedatangan etnis Tionghoa pertama kali di Semarang terjadi tahun 1406 (Yuanzhi, 2015) dengan mengendarai kapal-kapal layar besar atau *Wakang Tjoen* yang mendarat di daerah Mangkang. Kedatangan tersebut dalam rangka berdagang, aktivitas perdagangan yang dilakukan etnis Tionghoa lambat laun menjadi wadah pembauran dengan penduduk setempat

dan membuka daerah permukiman baru (Joe, 2004). Pada awal abad ke-15 permukiman etnis Tionghoa di Semarang tinggal secara menyebar di Mangkang dan Simongan. Namun, pada tahun 1740 terjadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terhadap *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang berujung dengan pembantaian orang Tionghoa di Batavia. Orang-orang Tionghoa yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke Semarang untuk bergabung dengan orang Tionghoa lainnya yang kemudian melakukan pemberontakan terhadap VOC (Ricklefs, 2008).

Kampung pecinan dibentuk karena adanya kekhawatiran pemerintah kolonial akan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa seperti pada tahun 1740. Kekhawatiran inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan *Wijkenstelsel* yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang dulunya berada di Gedong Batu atau Simongan kemudian direlokasi ke satu tempat supaya pemerintah kolonial lebih mudah mengawasi gerakan dan memutus hubungan masyarakat Tionghoa Semarang dengan daerah lain. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan permukiman bagi orang-orang Tionghoa yakni *Chinese Camp* atau Pecinan (Joe, 2004; Nurhajarini, D, R, 2019).

Kedatangan etnis Tionghoa di Kota Semarang turut membawa adat istiadat dalam kehidupannya dan senantiasa berpegang teguh terhadap tradisi leluhur. Aktivitas budaya yang dilakukan pada umumnya mempunyai keterkaitan dengan sistem religi maupun pemujaan terhadap leluhur karena umumnya etnis Tionghoa di Pecinan Semarang menganut kepercayaan

Tri Dharma (Taoisme, Confusianisme, dan Buddhisme).

Limitasi Kultural

Kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia pernah dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama dalam bidang kebudayaan selama masa pemerintahan Orde Baru. Sejak terungkap keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI, pemerintah Orde Baru kemudian mengambil tindakan berupa pemblokiran hubungan diplomatik dan pembatasan dalam bidang kebudayaan bagi masyarakat keturunan Tionghoa dengan tujuan mencegah masuknya paham komunisme Tiongkok ke Indonesia (Hariyono, 2006).

Upaya pencegahan masuknya paham komunisme dilakukan pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi ini ditujukan kepada orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia supaya dapat membaur dengan masyarakat lokal (Rahardjo, 2005). Pemerintah juga berharap dengan adanya kebijakan asimilasi dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan mampu memutus secara fisik maupun kultural dengan leluhur etnis Tionghoa yaitu negeri Tiongkok (Husodo, 1985).

Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dilandasi oleh Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Instruksi tersebut menjelaskan mengenai pembatasan bagi etnis Tionghoa dalam melakukan kegiatan di bidang keagamaan dan kebudayaan. Kegiatan peribadatan dan kebudayaan yang berhubungan dengan etnis Tionghoa hanya boleh dilakukan

secara internal dalam lingkup perorangan maupun keluarga saja dan tidak diperbolehkan ditampilkan di hadapan umum. Kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dilakukan karena segala hal yang berbau Tionghoa dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril terhadap warga negara Indonesia seperti kecemburuan sosial dan rasa bangga berbangsa dan berbudaya Indonesia yang menjadi dipertanyakan, karena lebih mengagungkan budaya negeri leluhurnya (Law, 1995). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sebuah hambatan dalam proses asimilasi, sehingga oleh pemerintah perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.

Adanya kebijakan diskriminatif membuat etnis Tionghoa memiliki ruang terbatas dalam menyelenggarakan upacara adat, peribadatan dan kebudayaan Tionghoa. Misalnya perayaan tahun baru Cina atau Imlek, pementasan wayang potehi, dan pertunjukkan barongsai yang hanya boleh dirayakan dalam lingkup keluarga saja secara tertutup selama masa Orde Baru. Selain itu, kebijakan asimilasi juga mengarah pada penutupan sekolah-sekolah Tionghoa yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tionghoa (Dawis, 2010; Sujarwoko, 2008).

Masyarakat keturunan Tionghoa menyikapi kebijakan diskriminatif dengan mengganti identitas asli dan kebudayaannya agar tetap dapat hidup di antara masyarakat Indonesia lainnya. Penggantian identitas tersebut dilakukan dengan cara mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Selain itu, banyak juga dari peranakan Tionghoa yang rela meninggalkan ajaran Konghucu dan pindah keyakinan memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia (Alkatiri et al., 2015).

Pembatasan yang dialami oleh etnis Tionghoa dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan selama masa Orde Baru membuat renggangnya tradisi ke generasi berikutnya dan terhapusnya identitas beberapa generasi Tionghoa di Indonesia (Shandy, 2014). Etnis Tionghoa dipaksa terputus secara fisik maupun kultural dengan nenek moyang dan leluhurnya. Oleh karena itu banyak generasi muda saat ini yang tidak mengetahui adat dan tradisi leluhur, terutama tradisi Konghucu (Wawancara dengan Bapak Mandy Martin Ismojo, tanggal 9 Juli 2024). Tidak sedikit juga para orang tua yang enggan untuk mengenalkan tradisi leluhur dan budaya Tionghoa kepada generasi penerusnya supaya pengalaman kelam di masa lalu tidak terjadi lagi (Shandy, 2014). Terputusnya identitas dan tradisi etnis Tionghoa terjadi karena adanya kebijakan terkait penggantian nama Tionghoa menjadi Indonesia dan pembatasan penyelenggaraan upacara tradisi keagamaan.

Nama Tionghoa menjadi Nama Indonesia

Kebijakan penggantian nama dilandasi oleh Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang ditujukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki nama Tionghoa supaya diganti menjadi nama Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bangsa Indonesia akan tekad masyarakat keturunan Tionghoa kepada Indonesia (Dawis, 2010). Penggantian nama berhubungan dengan penggunaan SBKRI dalam mengurus hal-hal administrasi seperti, akte kelahiran, KTP, Paspor, dll karena diwajibkan melampirkan SBKRI

(Effendi et al., 2006). Pemerintah daerah akan menanyakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) karena nama yang tercantum merupakan nama Tionghoa.

Peraturan ganti nama di Semarang melahirkan generasi etnis Tionghoa yang memakai nama Indonesia. Pemerintah juga turut memberikan beberapa opsi nama yang bisa digunakan (Pramana, 2011). Pemilihan nama didasarkan melalui beberapa pertimbangan yakni *pertama*, menggunakan nama pilihan sendiri (umumnya memasukkan unsur marga dalam nama Indonesia) misalnya marga salah seorang pengurus Klenteng Tay Kak Sie di gang Lombok dari Shan menjadi Santosa, marga Tan menjadi Tanoewijaya atau Tanjaya. *Kedua*, mengolaborasikan dengan nama Jawa atau Indonesia misalnya Nyoo Hong Kwan menjadi Hendro Imawan selaku Ketua Yayasan klenteng Siu Hok Bio di jalan Wotgandul Timur (Asep, 2001) dan Liem Eng Liong menjadi Mandy Martin Ismojo selaku umat klenteng Tay Kak Sie (Wawancara dengan Bapak Mandy Martin Ismojo, tanggal 9 Juli 2024). *Ketiga*, menggunakan nama-nama baptis Katolik/Kristen dan nama-nama Barat misalnya Christina, Antonius, Maria, dan lain-lain. Penggunaan nama baptis atau nama Barat merupakan pengaruh dari masyarakat yang beragama Kristen dan Katolik (Pramana, 2011).

Kebijakan penggantian nama yang dicanangkan oleh pemerintah faktanya tetap tidak membantu sepenuhnya etnis Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Etnis Tionghoa di Pecinan Semarang yang memakai nama Indonesia masih sering mendapatkan prasangka negatif berupa tuduhan bahwa nama Indonesia hanya digunakan sebagai alasan supaya tetap dapat tinggal di Indonesia (Pramana, 2011). Oleh karena itu, anjuran penggantian nama

tidak sepenuhnya menjamin bisa menyelesaikan permasalahan minoritas dalam waktu singkat dan terhapusnya praktik-praktik diskriminasi rasial (Lahirnya Konsepsi Asimilasi, 1977).

Melaksanakan Tradisi dalam Keterbatasan

Kegiatan peribadatan di Pecinan Semarang dibatasi seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14/1967. Segala kegiatan peribadatan dilaksanakan secara tertutup dalam lingkup keluarga tanpa ada kemeriahan dalam bentuk apa pun. Sudiyono salah satu masyarakat Kelurahan Kranggan merayakan Imlek secara sederhana hanya dengan berkumpul bersama keluarga dan berdoa di rumah tanpa ada perayaan atau pertunjukan budaya Tionghoa (Suara Merdeka, 1999). Bahkan untuk merenovasi klenteng pada masa Orde Baru saja dipersulit perizinannya, terutama klenteng yang sudah masuk kategori bangunan cagar budaya. Keterbatasan masa orde baru juga terlihat ketika di klenteng hanya terdapat pengurusnya saja tidak ada yang berani melakukan kegiatan berkumpul, berwisata, dan berdiskusi. Ketakutan akan aparat yang mengawasi sangat dirasakan sekali, sehingga banyak yang langsung bersembunyi ketika melihat ada aparat sospol (Wawancara Bapak Mandy Martin Ismojo, tanggal 9 Juli 2024).

Perayaan Imlek tahun 1980 kian sepi karena banyaknya masyarakat etnis Tionghoa yang berpindah agama yang diakui oleh pemerintah supaya dapat tetap hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya (Suara Karya, 1980). Prosesi peribadatan di klenteng sering kali merasa tidak nyaman dan leluasa karena adanya para

aparat yakni sospol yang mengawasi saat sembahyang berlangsung (Wawancara dengan Bapak Mandy Martin Ismojo, tanggal 9 Juli 2024).

Masyarakat keturunan Tionghoa yang melaksanakan ibadah di rumah juga tetap dilakukan secara diam-diam dengan situasi penuh ketakutan (Asikin, 2004). Selain itu, perayaan Imlek sudah tidak memiliki greget karena tidak ada pementasan barongsai dan tidak ada kesemarakan pesta dalam menyambut Imlek. Perayaan Imlek hanya tinggal ibadah yang dilakukan secara tertutup di rumah atau klenteng secara bergantian supaya tidak terlihat mencolok (Bernas, 1992).

PEMBAHASAN

Angin Segar Reformasi

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru kemudian dilanjutkan era reformasi dengan B.J Habibie sebagai presidennya. Era reformasi menjadi sebuah titik balik bagi etnis Tionghoa keluar dari diskriminasi yang telah berlangsung selama 32 tahun lamanya. B.J Habibie merasa prihatin melihat adanya praktik diskriminasi yang dijalankan oleh Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Oleh karena itu, Habibie mengeluarkan 2 kebijakan untuk menghilangkan praktik diskriminasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 mengenai penghapusan istilah pribumi dan non pribumi, serta menginstruksikan pejabat pemerintah supaya bersifat adil ketika melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan asal usulnya (Issamsudin, 2002).

Selain itu, upaya penghapusan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara sebenarnya telah dilakukan pada masa Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, namun

diperkuat kembali oleh Habibie melalui Inpres Nomor 4 Tahun 1999 mengenai penghapusan SBKRI. Dengan dihapusnya SBKRI maka bukti kewarganegaraan seseorang cukup dibuktikan dengan menggunakan KTP, KK, atau Akta Kelahiran (Effendi et al., 2006).

Habibie harus mengakhiri jabatannya sebagai presiden karena adanya berbagai tuntutan dari masyarakat atas kebijakan referendum Timor Timur. Kemudian jabatan presiden selanjutnya dipegang oleh Gus Dur melalui pemilu tahun 1999. Gus Dur ialah presiden yang dibesarkan dari kelompok agama sehingga berbagai kebijakan yang dibuat oleh Gus Dur khususnya dalam bidang keagamaan tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih.

Etnis Tionghoa adalah salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi selama Orde Baru, namun di masa pemerintahan Gus Dur justru mendapatkan sebuah pengakuan yang sama sebagai warga negara. Gus Dur telah memberikan jalan kebebasan bagi masyarakat keturunan Tionghoa dalam melaksanakan ibadah dan menyelenggarakan kebudayaan secara terbuka di hadapan umum. Melalui kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Keppres yang dikeluarkan Gus Dur pada 17 Januari 2000 tersebut menandakan setiap penyelenggaraan keagamaan dan kebudayaan Tionghoa dilaksanakan tanpa harus menggunakan perizinan khusus seperti yang diterapkan masa Orde Baru. Perayaan imlek dan gelaran kebudayaan secara

terbuka dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat hubungan keluarga seperti yang terjadi ketika perayaan lebaran bagi umat Muslim (Arichin, 2002).

Kabar baik untuk etnis Tionghoa terus berlanjut dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2001 yang menetapkan Hari Raya Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Fakultatif atau hanya berlaku untuk yang merayakannya saja (Fikri, 2012). Sejak ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, maka bagi umat yang merayakan tidak perlu meminta izin libur sekolah atau kerja karena secara otomatis sudah mendapatkan dispensasi untuk merayakannya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud toleransi antar umat beragama, karena H-1 perayaan Imlek biasanya diadakan sembahyang terlebih dahulu untuk leluhur yang sudah meninggal atau nyadran (Wawancara Liem Yi Haow, tanggal 9 Juli 2024).

Walaupun Imlek sudah dijadikan hari libur fakultatif, namun ada beberapa pihak yang mengusulkan kepada pemerintah supaya menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Salah satu organisasi mahasiswa di Semarang yakni PMII turut mengusulkan supaya Tahun Baru Imlek dijadikan sebagai hari libur resmi nasional dan Konghucu dijadikan agama resmi di Indonesia (Suara Merdeka, 2002). Usulan dari PMII tersebut dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang pluralis dan humanis sehingga tidak membatasi agama tertentu. Selain itu, salah satu anggota DPRDSU yakni Hitler Siahaan juga turut menyarankan supaya Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional sebagai penghormatan terhadap masyarakat keturunan Tionghoa yang berperan membantu RI sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia (Waspada, 2002).

Berselang 2 tahun pasca ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, kemudian imlek secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Megawati. Penetapan ini dilakukan untuk meneruskan program pemulihan hak sipil dari masyarakat keturunan Tionghoa yang menganut Konghucu (Rasid, 2017). Eksistensi perayaan Imlek masa reformasi menjadi lebih sempurna semenjak ditetapkan sebagai hari libur nasional karena tidak hanya umat Konghucu yang menikmati kemeriahan dari kebudayaan Tionghoa seperti Lampion, Liong, dan barongsai, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu memengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia menjadi lebih beragam.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hak-hak etnis Tionghoa juga semakin diakui dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah "China" menjadi "Tionghoa". Pertimbangan pencabutan surat edaran tersebut dilakukan karena perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya perubahan penyebutan istilah dari China menjadi Tionghoa dinilai lebih sopan dan tidak rasis (Wawancara Bapak Roni Prasetya, tanggal 27 Juli

2024).

Imlek di Tengah Kemerdekaan Berekspresi

Perjalanan perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia mengalami pasang surut karena pada masa Orde Lama, Imlek merupakan kegiatan yang sangat berarti dan berkesan bagi etnis Tionghoa sebab tidak ada larangan dari pemerintah untuk merayakannya. Kegiatan perayaan Imlek ini sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat Tionghoa yang menganut Konghucu. Namun, Konghucu pernah menjadi agama yang tidak diakui oleh pemerintah masa Orde Baru sehingga situasi tersebut memberikan ruang terbatas bagi etnis Tionghoa dalam merayakannya. Era reformasi memberikan angin segar bagi etnis Tionghoa karena peraturan yang diskriminatif telah dicabut sehingga perayaan agama dan kebudayaan bisa ditampilkan lagi di hadapan umum.

Kegiatan perayaan tahun baru Imlek disambut etnis Tionghoa dengan membersihkan rumah dan klenteng. Menurut kepercayaan Tionghoa, rumah diibaratkan seperti jiwa manusia, ketika jiwa sudah bersih, maka yang merayakannya siap untuk mendapatkan kenikmatan setahun mendatang (Suara Merdeka, 2001). Selain itu, persiapan dilakukan dengan menyediakan perlengkapan untuk upacara dan memeriahkan Imlek seperti, kue keranjang, *hio* atau dupa, ornamen berupa tulisan yang dipasang di rumah-rumah warga sehingga suasana kampung Pecinan akan berwarna merah dan terang dari cahaya lampion (Suara Merdeka, 2002).

Kemeriahan perayaan Imlek di Pecinan Semarang terlihat dari event yang digelar setiap tahunnya. Salah satu event yang pernah digelar tahun 2002 berjudul "*Red Town Festival*" yang mengadakan

berbagai perlombaan seperti, lomba memasak, menyanyikan lagu Mandarin, dan lomba membuat lampion. Selain itu, festival kesenian akan menampilkan atraksi barongsai, musik gambang Semarang, pameran makanan khas, dan *Fashion Show* (Merd, 2002). Kegiatan ini tentunya melibatkan beberapa klenteng yang berada di Pecinan Semarang, seperti klenteng Tay Kak Sie dan sejumlah klenteng di Gang Pinggir. Kemeriahan perayaan Imlek tidak hanya terjadi di Pecinan saja, melainkan di hotel-hotel Semarang. Sejumlah hotel berbintang di Semarang, seperti Graha Santika, Patra Jasa, Ciputra dan Grand Candi memberikan nuansa Imlek berupa hiasan lampion, tulisan *Gong Xi Fa Cai*, dan sajian makanan Cina. Selain itu, pertunjukan barongsai dan liong di lobi hotel Ciputra menjadi sebuah hiburan bagi para tamu untuk ikut memeriahkan Imlek (Adi, 2002).

Masyarakat etnis Tionghoa memusatkan prosesi kegiatan Imlek di klenteng. Klenteng Tay Kak Sie yang berada di Gang Lombok, Semarang, menjadi salah satu tempat ibadah yang bakal ramai dikunjungi untuk melakukan sembahyang. Klenteng Tay Kak Sie memiliki aktivitas rutin yang dilakukan setiap perayaan Imlek yakni membagikan sembako berupa beras kepada masyarakat yang kurang mampu di area klenteng (Suara Merdeka, 2001). Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan ungkapan suka cita dari umat Konghucu atas kebebasan menjalankan aktivitas keagamaan tanpa harus meminta izin kepada pemerintah.

Perayaan Imlek menjadi momentum untuk merekatkan tali persaudaraan, terutama untuk

hubungan orang tua dan anak. Momentum ini digunakan oleh para orang tua untuk memberikan penilaian, nasihat, dan ampunan kepada anak-anaknya. Tradisi anak-anak mengunjungi orang tua untuk memohon ampun kepadanya sekaligus untuk menebus dosa-dosa yang selama setahun diperbuat (Subagyo, 2001). Perayaan Imlek sama halnya dengan Lebaran bagi umat muslim karena selain menjadi momentum memohon ampunan kepada yang lebih tua juga sekaligus dalam penyambutannya akan mengenakan baju baru bagi yang mampu dan berdandan rapi (Wawancara Bapak Roni Prasetya, tanggal 27 Juli 2024). Selain itu, para orang tua juga memberikan angpao, yakni berupa amplop merah berisi uang. Memberikan angpao yang diperoleh dari hasil jerih payahnya kepada anak dan cucu juga menjadi salah satu tradisi bagi etnis Tionghoa ketika merayakan Imlek. Para orang tua percaya dengan memberikan angpao dipercaya akan mendapatkan rezeki yang lebih dari sang pencipta (Adi, 2002).

Perayaan Tahun Baru Imlek dilakukan setiap keluarga dengan membuat atau menyediakan kue keranjang yang terbuat dari beras ketan dan gula pasir berbentuk bulat dalam kemasan plastik. Kue keranjang mengandung makna untuk mempererat tali persaudaraan supaya sanak saudara tidak tercerai berai. Makna ini tercermin dari beras ketan ketika dipegang akan "lengket". Beberapa keluarga Tionghoa menyediakan jeruk (umumnya jeruk Mandarin), baik untuk keperluan sembahyang maupun dikirim kepada sanak saudara. Jeruk sering digunakan oleh etnis Tionghoa sebagai sesaji sembahyang karena jeruk merupakan simbol kebahagiaan karena mengandung *chi* atau keberuntungan. Selain itu, bagi keluarga yang mampu, biasanya menyediakan makanan yang lezat seperti lontong *Cap Go*

Meh untuk disantap bersama keluarga. Sebelum makan bersama, didahului acara sembahyang dengan cara menghadap meja yang telah dilengkapi dengan sarana seperti, lilin, hio atau dupa, dan sesaji. Sembahyang ini didahului oleh orang tua, disusul anak, dan cucu dengan membakar *hio* yang fungsinya untuk mengadakan kontak dengan para dewa.

Rangkaian perayaan Imlek akan berakhir pada malam *Cap Go Meh* sebagai malam untuk bersuka ria, masyarakat dari berbagai kalangan akan membanjiri jalan-jalan untuk menonton lampion atau mengikuti karnaval. Karnaval diikuti oleh para remaja maupun orang tua yang berbau merayakannya dengan bergerombol (Suara Merdeka, 2001). Selain itu, untuk menikmati malam terakhir perayaan Imlek maka etnis Tionghoa menyajikan kuliner lontong *Cap Go Meh* yang sengaja dihidangkan untuk menyambut malam penutup perayaan Imlek.

Mengenal Barongsai

Barongsai adalah kesenian tradisional etnis Tionghoa, para pemain dalam melakukan tarian menggunakan perlengkapan berupa topeng (*samsi*) yang menyerupai bentuk singa. Pertunjukan barongsai lebih melibatkan atraksi yang dikombinasikan dengan tarian (Nanik, 2016). Pertunjukan barongsai biasanya dilakukan di atas lantai, di panggung, maupun di atas tonggak atau pilar besi dengan gerakan yang bebas tergantung kreativitas sang pemain yang disesuaikan dengan alunan musik.

Perayaan Imlek di Pecinan Semarang semakin meriah dengan adanya beberapa kelompok barongsai,

seperti Padma Tri Kumala (Suara Merdeka, 2002), Delapan Dewa, Harimau Sakti, dan Naga Hitam yang berkeliling di Pecinan sehingga menjadi hiburan bagi etnis Tionghoa dan masyarakat sekitar. Terdapat sebuah tradisi unik sebelum barongsai berkeliling di area Kampung Pecinan, rombongan barongsai berkunjung terlebih dahulu ke Klenteng Tay Kak Sie di Gang Lombok untuk berdoa supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Masyarakat sangat antusias untuk melihat atraksi barongsai sehingga jalan-jalan di sekitar kawasan Kampung Pecinan Semarang tampak padat akan kerumunan penonton.

Barongsai mulai berkeliling dari Gang Lombok menuju ke beberapa klenteng di Pecinan. Ketika memasuki Gang Pinggir, beberapa barongsai melakukan kepiawaiannya dalam menari dan meloncat, beberapa ada yang masuk ke toko emas untuk meminta angpau (Adi, 2002). Masyarakat yang ingin memberikan angpau dapat melemparkannya ketika barongsai mendekat dan membuka mulut samsinya. Harapan masyarakat dengan memberikan angpau, para dewa akan membalasnya dengan memberikan kesehatan dan kemakmuran. Arak-arakan ini biasanya dilakukan ketika sore hari, sehingga malamnya yang bertepatan dengan perayaan *Cap Go Meh* ditutup dengan sebuah pertunjukan musik Yang Qin (sejenis musik tradisional Cina).

Menikmati Kue Keranjang, Misoa, dan Lontong *Cap Go Meh*

Kue keranjang merupakan salah satu menu yang wajib dihidangkan ketika Imlek. Nama asli kue keranjang adalah *tie kue* yang berarti kue manis. Kue keranjang ini sebagai simbol harapan supaya tahun baru mendatang lebih manis dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat pecinan dapat menemukan kuliner kue keranjang dengan segala macam rasa dan kualitas yang berpusat di pasar Gang Baru. Suasana pasar tersebut sebagai sentra penjualan kue keranjang sudah mulai ramai dikunjungi oleh pembeli seminggu sebelum Imlek.

Perayaan Imlek tidak hanya identik dengan kuliner kue keranjang saja, terdapat menu khas lain yang biasanya disajikan saat berkumpul dan merayakan Imlek bersama keluarga yakni misoa dan soun. Keduanya menjadi kuliner wajib bagi keluarga Ratna Dewi yang tinggal di jalan Kranggan setiap merayakan Imlek. Misoa dan Soun sebagai simbol harapan supaya diberikan umur yang panjang. Ratna Dewi mengatakan bahwa Misoa dan Soun memiliki bentuk yang kenyal dan ulet sehingga tidak mudah patah (Reny Martini, 2001).

Kuliner yang khas dari Kota Semarang ketika perayaan Imlek adalah Lontong *Cap Go Meh*. Lontong *Cap Go Meh* merupakan salah satu bentuk akulturasi Jawa-Tionghoa di bidang kuliner (Utomo, 2020). Kuliner ini hampir mirip dengan lontong opor, yang menjadi pembedanya terletak pada racikan bumbu santannya dan memiliki komponen yang lebih komplit, seperti sayur lodeh, opor ayam, rebung, tahu, sambal goreng, dan bubuk kedelai. Jongkie Tio sebagai pemerhati Tionghoa Kota Semarang berpendapat bahwa orang Tionghoa memilih menggunakan lontong karena bentuknya yang bulat dan panjang ketika dipotong kecil-kecil akan menyerupai bulan purnama yang biasanya muncul di tanggal 15 atau bertepatan dengan malam *Cap Go Meh*

sebagai penutup dalam rangkaian perayaan Imlek. Lontong *Cap Go Meh* dihidangkan pada malam terakhir perayaan Imlek supaya etnis Tionghoa bisa saling berbagi makanan dengan yang halal kepada tetangga sekitar

SIMPULAN

Kehidupan etnis Tionghoa di Semarang pada masa reformasi merupakan sebuah momentum yang mengesankan karena kebebasan yang telah diraih dalam merayakan ibadah dan tradisinya di hadapan umum tanpa rasa khawatir akan perizinan yang sulit dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Pada masa reformasi inilah etnis Tionghoa mendapatkan legitimasi yang maksimal atas hak-hak sebagai warga negara Indonesia melalui pencabutan beberapa kebijakan diskriminatif yang diterapkan selama masa Orde Baru. Reformasi ini memberikan sentuhan positif bagi kelayakan hidup etnis Tionghoa, menjadi sejajar dengan etnis lain di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implikasi kebebasan yang diraih etnis Tionghoa di Semarang pada masa reformasi terlihat dari perayaan Imlek yang disambut secara meriah di kawasan Pecinan dan di hotel-hotel turut merasakan euforianya. Berbagai kesenian Tionghoa seperti barongsai, liong, dan sajian kuliner menjadi sarana untuk menghibur dan berbagi kebahagiaan terhadap masyarakat umum. Perayaan imlek menjadi sebuah momentum untuk mensyukuri nikmat, mempererat tali persaudaraan, dan berdoa untuk kebaikan di masa yang akan datang. Perasaan untuk saling menghormati kepercayaan dan kebudayaan antar etnis merupakan sarana menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saran untuk peneliti selanjutnya ialah melakukan penelitian etnis Tionghoa tidak

hanya dari sudut pandang orang Tionghoa saja, melainkan juga dari sudut pandang masyarakat lokal. Selain itu, fokus penelitian tentang kehidupan etnis Tionghoa masa pemerintahan B.J Habibie supaya lebih banyak dikaji untuk menambah literatur bacaan di awal masa reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adra, H. M. (2023). Dinamika Kebudayaan Tionghoa di Semarang. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 3(2), 460–475. <https://doi.org/10.30998/je.v3i2.1574>
- Alamsyah, D. A., Purwaningsih, S. M. (2019). Harmonisasi Hubungan Antara Etnis Tionghoa dengan Etnis lainnya di Surabaya pada Masa Kerusuhan Mei 1998. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/27422>
- Alkatiri, Z. Z., Moeliono, V. I., & Waworuntu, A. L. (2015). The Failure of Indonesian Integration in the Reform Era: a Case of Semarang`s Chinese Community. *International Journal of Social Science Studies*, 3(2), hlm. 61–70. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v3i2.630>
- Anis, M., & Sari, Y. (2018). anis, madhan, & Sari, Y. (2020). Kesenian Barongsai Sebagai Sarana Pembauran Masyarakat Tionghoa di Aceh Tamiang. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 5(2), 207-223. Retrieved from <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/2100>
- Arichin, R. (12, Februari 2002). Imlek di Tengah Konflik Sosial. *Suara Merdeka*,
- Asep, A. (14, Januari 2001). “Imlek, Malah Tidak Ada Acara Ritual yang Khusus”. *Suara Merdeka*.
- Asikin, S. (17, Januari 2004). “Setelah Ketakutan Menahun Itu”. *Suara Merdeka*,
- Bernas, B. (5, Februari 1992). “Barongsay Itu Sudah Mati”. hlm. 1 & 11. Diakses pada 23 November 2023.
- Choironi, R. (2004). Karakteristik Ruang Baru, Pecinan Semarang. Masters Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/12016/>
- Christie, R., Michaela, M., Kheista, K., & Chandrawinata, M. (2023). Pluralisme Agama Dalam Konteks Kehidupan Kebangsaan Multikultural. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 758–765. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4920>
- Dawis, A. (2010). *Orang Tionghoa Berorganisasi: Yang Kini Lanjutan Dari Masa Lalu?*, dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan, editor, *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca peristiwa Mei 1998*. Kompas. Jakarta
- Debby, T. R., & Dewi, S. P. (2019). Transformasi Sosio-Spasial Kawasan Pecinan Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), hlm. 46. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.46-56>
- Effendi, W., Mihardja, S., Masyhuri, A. A., Sihotang, S., & Tarigan, K. P. (2006). *SBKRI Analisis dan Hasil Pemantauan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta

- Fikri, I. M. & A. (2012). *Bapak Tionghoa Indonesia*, LKIS. Yogyakarta
- Ginting, S. O. B., M, S., & Ekwandari, Y. (2019). Etnis Tionghoa pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah: PESAGI*, 7(5), hlm. 1–12. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/19728#>
- Hariyono, P. (2006). *Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa: Dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis Hingga Kini*. Mutiara Wacana. Semarang
- Husodo, S. Y. (1985). *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri. Jakarta
- Issamsudin, I. (12, Februari 2002). “Antara Imlek dan Diskriminasi Etnis”. *Suara Merdeka*. Diakses pada 6 September 2023.
- Joe, L. T. (2004). *Riwayat Semarang. Hasta Wahana*. Jakarta
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana. Yogyakarta:
- Law, P. (31, Januari 1995). “Imlek, Antara Tradisi dan Upaya Asimilasi”. *Analisa*, hlm. 4. Diakses pada 7 Desember 2023.
- Liana, L. (2005). Potensi Perayaan Tahun Baru Imlek di Kawasan Pecinan Semarang. Program Diploma Kepariwisata Universitas STIKUBANK Semarang. *Dinamika Kepariwisata: Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Kepariwisata & Perhotelan*. 3(1). 253-264.
- <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/pdk1/article/view/587>
- Munawar, Z. (2020). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 10–23. <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>
- Nanik, S. (2016). *Multicultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal “Kesenian Barongsai dan Lion.”* Media Nusa Creative. Malang
- Nugroho, G. A. (13, Februari 2002). “Hotel-Hotel Menyambut Imlek: Barongsai, Lampion, dan Tarian Asli Cina”. *Suara Merdeka*, hlm. 14. Diakses pada 6 September 2023.
- Nugroho, G. A. (13, Februari 2002). “Keriuhan Imlek dan Kisah Nian”. *Suara Merdeka*. Diakses pada 6 September 2023.
- Nugroho, G. A. (27, Februari 2002). “Liong Door to Door ke Toko Emas”. *Suara Merdeka*, hlm. 13–14. Diakses pada 6 September 2023.
- Nurhajarini, D, R, D. (2019). *Kota Pelabuhan Semarang dalam Kuasa Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim Tahun 1800an-1900an*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNBP) Yogyakarta. Yogyakarta
- Nurhidayah, A. R. (2023). Memupuk Persaudaraan Pasca Kerusuhan Toleransi Beragama Di Surakarta, 1998-2004. *Skripsi*. Departemen Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6731/1/Full%20Skripsi%20Resty.pdf>

- Pramana, M. G. G. (2011). Pelaksanaan Penggantian Nama Tionghoa dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Mencapai Kesetaraan Sosial di Kalangan WNI Keturunan Tionghoa di Kelurahan Jagalan Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
https://repository.unsri.ac.id/71459/9/RAMA_74201_02011281823191_0012046302_0018077902_01_front_ref.pdf
- Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodik, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. *Journal of Indonesian History*, 6(1), hlm. 66–74.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/20031>
- Rahardjo, T. (2005). Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina. *Dialogue JIAKP*, 2(2), hlm. 780–802.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/465>
- Rasid, F. (2017). Gus Dur Dan Agama Konghucu Di Indonesia. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34724/2/FAUR%20RASID-FU.pdf>
- Reny, M., & Asep, B. S. (14, Januari 2001). “Menu Khas Menyambut Imlek: Misoa dan Soun Perlambang Panjang Umur”. *Suara Merdeka*. Diakses pada 23 Agustus 2023.
- Ricklefs, M. . (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Serambi. Jakarta
- Sanjaya, I., Suswandari, S., & Gunawan, R. (2022). Nilai–nilai tradisi budaya *Cap Go Meh* pada masyarakat Cina Benteng di Tangerang sebagai sumber pembelajaran di sekolah. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 384–401.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.23163>
- Shandy, P. N. (2014). Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Budaya & Ekonomi Keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, 1967-2002. Masters Thesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/44328/>
- Siauwgioktjhan. (1977). *Lahirnya Konsep Asimilasi*. Yayasan Tunas Bangsa. Jakarta
- Suara Karya*. 18 Februari 1980. “Tradisi Imlek Kian Melenyap”. hlm. 1. Diakses pada 7 Desember 2023.
- Suara Merdeka*. 12 Februari 2002. “Barongsai Keliling di Pecinan: Pengemis Padati Klenteng Gang Lombok”. hlm. 12. Diakses pada 6 September 2023.
- Suara Merdeka*. 12 Februari 2002. “PMII Usul Imlek Jadi Hari Libur Nasional”. hlm. 4. Diakses pada 6 September 2023.
- Suara Merdeka*. 14 Februari 2002. “Red Town Festival Meriahkan Imlek”. Diakses pada 6 September 2023.
- Suara Merdeka*. 16 Februari 1999. “Rayakan Imlek, Hanya Berdoa”. Diakses pada 6 September 2023.
- Suara Merdeka*. 21 Januari 2001. “Diawali dengan Membersihkan Rumah”. hlm. 19. Diakses pada 23 Agustus 2023.
- Suara Merdeka*. 21 Januari 2001. “Imlek 2552, Awal Kebangkitan Kong Hu CU”. Diakses pada 23 Agustus 2023.

- Suara Merdeka*. 21 Januari 2002. "Dirayakan, Meski Tak Semeriah Tahun Baru Masehi". Hlm 7. Diakses pada 23 Agustus 2023.
- Suara Merdeka*. 24 Januari 2001. "Cap Go Meh, Pesta Perayaan Imlek". Diakses pada 23 Agustus 2023.
- Subagyo, Slamet. 24 Januari 2001. "Gong Xi Fa Cai: Sin Cun Kiong Hie". *Suara Merdeka*. Diakses pada 23 Agustus 2023.
- Sujarwoko. (2008). Politics of ethnic discrimination and resistance: The Chinese ethnic in Indonesia 1998-2008. *Tesis*. <https://thesis.eur.nl/pub/7032/Sujarwoko PAD.pdf>
- Sukmanasa, Elly, dkk. (2020). Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Powtoon Bagi Guru Sekolah Dasar Gugus 1 Kota Bogor. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 95–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/transformasi.v16i1.2140>
- Suliswati, D. dan F. R. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 348–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977>
- Suliyati, T. (2011). Penerapan Feng Shui Pada Bangunan Kelenteng Di Pecinan Semarang. *Jurnal Sabda*, 6(1), 1–16. [http://eprints.undip.ac.id/3255/2/11_artikel B' Titiek.pdf](http://eprints.undip.ac.id/3255/2/11_artikel_B%27_Titiek.pdf)
- Suryaningtyas, Amelia & Weningsyastuti, R. (2018). Eksistensi dan Strootip Etnis Tionghoa Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(3), 235–240. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2232>
- Susilo, A. & S. (2019). *Perkembangan Surulangun Pada Masa Onder Afdeling Rawas*. Nusa Litera Inspirasi. Cirebon
- Susilo, A., & Asmara, Y. (2023). Pelestarian Desa Budaya Batu Urip Sebagai Sejarah Budaya Lokal Kota Lubuk Linggau. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 23(2), 78–83. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v23i2.20433>
- Susilo, A., & Sofiarini, A. (2018). Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. 1(1), 62–71. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v1i1.233>
- Utomo, W. P. (2020). Perkembangan Kuliner Tionghoa dari Rumah Makan Sampai Restoran Besar Semarang 1985-1991. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/38879/>
- Wasino, W., Putro, S., Aji, A., Kurniawan, E., & Shintasiwi, F. A. (2019). From Assimilation to Pluralism and Multiculturalism Policy: State Policy Towards Ethnic Chinese in Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(2), hlm. 213–223. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/20869>

- Waspada. 11 Februari 2002. "Anggota DPRDSU Sarankan Imlek Jadi Hari Libur Nasional". hlm. 3. Diakses pada 30 April 2024.
- Wijayati, P. A., Purwanto, B., MArgana, M. (2019). *Sejarah Sosial Pasar Johar Semarang Abad ke-20*. Disertasi. Universitas Gajah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/pelelitian/detail/169202>
- Yuanzhi, K. (2015). *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta